



P U T U S A N
Nomor 3674 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUTARDI, bertempat tinggal di Ngelak, RT 007 RW 003, Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Deddy Suwadi SR, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sawojajar Nomor 19, Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Keparak, Mergangsan, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Agus Tri Yuwono ST., M.Eng., selaku Kepala Seksi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Brigjend. Katamso Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;
- 2. PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**, alamat Kantor Pusat : Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran, Blok B.12, Kav.2, Jakarta Pusat **cq PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, beralamat di Jalan Solo Km. 9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Sulistyio Wimbo S. Hardjito selaku Presiden Direktur, dalam perkara ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



kepada R. Sujiastono, selaku Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016. Selanjutnya penerima kuasa telah memberikan kuasa substitusi kepada Tony T. Spontana, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Agustus 2016. Kemudian penerima kuasa substitusi telah memberikan kuasa substitusi kembali kepada Herwan Purwoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sukonandi Nomor 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Kembali tanggal 24 Agustus 2016; Para Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II, III dahulu Termohon Keberatan I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan sekarang Para Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II, III dahulu Termohon Keberatan I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Termohon Keberatan I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo di mana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo;
2. Bahwa Termohon Keberatan II (PT Angkasa Pura I Persero), berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, baik fisik maupun non fisik, kepada masyarakat

Halaman 2 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo;

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah petani tambak, yang mengelola usaha tambak sebagai mata pencaharian, diatas tanah Paku Alam Ground (PAG), masing-masing seluas 1.144 m², dan seluas 255 m², yang kesemuanya terletak di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas:
 - a. Usaha Tambak seluas 1.144 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Timur : Sido Sarsan;
 - Sebelah Selatan : Poniran;
 - Sebelah Barat : Suratin;
 - b. Usaha Tambak seluas 255 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani
 - Sebelah Timur : Sido Sarsan
 - Sebelah Selatan : Poniran
 - Sebelah Barat : Suratin
4. Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan I, sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, tentang Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pembangunan Bandara Baru Kabu Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; Terdaftar dalam Bidang Tanah PAG tercatat dalam Bidang Tanah PAG Nomor Urut 34 seluas 255 m² dan Nomor Urut 83 seluas 1.144 m² atas nama Sutardi (Pemohon Keberatan); (Vide fotokopi bukti terlampir);
5. Bahwa di lokasi tempat usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut adalah termasuk sebagai kawasan peruntukan perikanan budi daya perikanan air payau, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012, dimana hasil produksi usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, berupa udang dibeli oleh para pedagang dari Yogyakarta dan sekitarnya. Dan usaha tambak tersebut memberikan kesejahteraan bagi Pemohon Keberatan dan keluarganya;
6. Bahwa secara yuridis usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan seharusnya mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 3 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 33 huruf f Penjelasan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjelaskan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian Non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti;
- b. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. Pasal 56 ayat (1) a Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030. Yang secara tegas menerangkan bahwa arahan pengembangan zona perikanan budi daya dengan mengembangkan perikanan budi daya air payau di Kecamatan Temon , Wates dan Galur;
- d. Pasal 46 ayat (3) huruf b Perda Nomor 1 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 berbunyi sebagai berikut: "Kawasan peruntukkan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (kawasan peruntukkan perikanan budi daya) meliputi budi daya perikanan air payau di Kecamatan Temon, Wates dan Galur;

Maka beda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon Keberatan berhak atas pemberian ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Termohon Keberatan I, telah mengundang warga masyarakat petani tambak yang masuk dalam daftar nominatif pemberian ganti rugi usaha tambak yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, bertempat di Balai Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan para warga masyarakat petani tambak Desa Jangkar Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Dalam pertemuan tersebut Termohon Keberatan I (Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) memberikan penjelasan, bahwa terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut, tidak mendapatkan penilaian ganti kerugian atau usaha tambak para petani tambak tersebut dinilai Rp0,00 (nol rupiah) , dikarenakan adanya *legal opinion* (pendapat hukum) dari Kejaksaan Tinggi

Halaman 4 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Yogyakarta. Dan bagi warga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 tersebut, oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

8. Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikan penilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidak wajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini Para Termohon telah diintervensi oleh pihak lain, yang tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Keberatan;
9. Bahwa untuk mengolah lahan agar dapat dipergunakan untuk budi daya tambak memerlukan biaya yang cukup besar, karena untuk pembuatan tambak dan perlengkapannya pada lahan seluas 1144 m² dan seluas 255 m², sehingga total lahan tambak seluas 1.399 m² dibutuhkan biaya seluruhnya Rp45.190.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

A. Pembuatan Tambak Dan Perlengkapannya

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga
1	Sumur Pantek	1 unit	500.000	500.000
2	Paralon Sumur	80 batang	78.000	6.240.000
3	Doser	12 jam	350.000	4.200.000
4	Pintu Air	1 unit	1.500.000	1.500.000
5	Paralon Sipon	8 batang	125.000	1.000.000
6	Spiral Sipon	1 unit	1.250.000	1.250.000
7	Mulsa Tambak	2 roll	1.500.000	3.000.000
8	Diesel Sumur Pantek	1 unit	3.500.000	3.500.000
9	Water Pump	1 unit	1.000.000	1.000.000
10	Kincir & Kelengkapannya	2 set	8.500.000	17.000.000
11	Tenaga Setting Tambak	1 grup	2.000.000	2.000.000
12	Pembuatan Gardu Jaga	1 unit	2.500.000	2.500.000
13	Instalasi Penerangan	1 unit	1.500.000	1.500.000
Total Pembuatan Tambak				45.190.000

B. Perincian Budi Daya

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga/Rp.	Total Harga/Rp
-----	-------------	--------	-----------	----------------



1	Solar	850 liter	5.150	4.377.500
2	Benur	70.000 ekor	45	3.150.000
3	Pakan	1.200 Kg	15.800	18.960.000
4	Obat2an (Probiotik & Plankton)	1 paket	2.000.000	2.000.000
5	Tenaga Kerja	1 group	3.500.000	3.500.000
Total Biaya Budi Daya				31.987.500

C. Hasil 1 X Panen

	Harga Jual per-Kg/ Rp	Hasil 1 x Panen	Harga/Rp.
	70.000	1.500 Kg	105.000.000

D. Hasil Usaha/Keuntungan Keseluruhan Produksi

- Hasil 1 x Panen	105.000.000
- Biaya Budi Daya	31.987.500
Keuntungan 1 x Panen	73.012.500
Keuntungan Selama 1/satu Tahun (3 x Panen)	219.037.500

E. Kerugian Non Fisik

Kerugian kehilangan mata pencaharian **Rp. 219.037.500**

F. Kerugian yang dialami Pemohon, baik secara fisik/langsung dan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp):

- Pembuatan Tambak	45.190.000
- Keuntungan Yang Diperoleh	219.037.500
- Kehilangan Mata Pencaharian	219.037.500
Total Kerugian Pemohon	483.265.000

(Enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, masuk dalam area rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, hal ini Pemohon Keberatan mengetahui dari sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat setempat tentang rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, baik melalui tatap muka atau melalui surat pemberitahuan dan pemberitaan media cetak atau media elektronik. Sehingga sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan turut mendukung berdirinya bandara tersebut, serta aktif mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Pemohon Keberatan mengetahui daftar nominasi pemberian ganti rugi terhadap warga yang terdampak pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo, berdasarkan pengumuman di kantor Kepala Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan penjelasan dari Panitia Pengadaan, usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tidak mendapatkan ganti rugi dengan alasan ada Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Dalam hal ini Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Termohon Keberatan I, yang seharusnya bertindak independen dan tidak boleh diintervensi pihak manapun. Sehingga tindakan panitia pelaksana pengadaan tanah *a quo* (Termohon Keberatan I) yang tidak memberikan nilai ganti kerugian atas obyek usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, telah merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Keberatan;
11. Bahwa usaha tambak udang yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut, telah masuk dalam daftar nominasi terdampak pembangunan bandara baru tersebut adalah termasuk kerugian Non Fisik/Tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 huruf f Penjelasan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti;
12. Bahwa Penggugat sebagai petani tambak telah kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian atas modal dan hasil keuntungan usaha tambak yang dikelola oleh Penggugat, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012;
12. Bahwa Termohon Keberatan I tidak memberikan penilaian atas kerugian usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, sebagaimana dimaksud dalam daftar nominasi terhadap warga yang terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Kulonprogo tersebut. Dalam hal ini Para Termohon Keberatan,

Halaman 7 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberikan penilaian perhitungan ganti kerugian terhadap nilai/harga objek usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut. Bahwa Termohon Keberatan bertugas melakukan pandataan dan penilaian besarnya ganti kerugian pembebasan tanah dengan menilai bidang per bidang, meliputi :

- a. Kerugian Fisik/Langsung; berupa
 1. Tanah;
 2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 3. Bangunan;
 4. Tanaman;
 - 5 Benda yang berkaitan dengan tanah;
- b. Kerugian non fisik/tidak langsung;
 - berupa kerugian lain yang dapat dinilai

13. Bahwa usaha tambak yang dilakukan Pemohon Keberatan, membutuhkan biaya yang cukup besar, baik berupa modal sendiri maupun pinjaman dari pihak lain, yang digunakan untuk biaya pembuatan tambak maupun biaya perawatan serta biaya produksi. Dalam hal ini Pemohon Keberatan telah kehilangan mata pencaharian dan keuntungan yang diharapkan; Dan modal yang telah ditanam pada usaha tambak tersebut, menjadi musnah akibat tidak diberikannya ganti kerugian kepada Pemohon, akibat Rencana pembangunan Bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo;
14. Bahwa terkait dengan tidak dilakukannya penilaian nilai ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan atas dampak dari perencanaan pembangunan untuk bandara baru tersebut, Pemohon Keberatan sangat berkeberatan, sebab Pemohon telah dirugikan oleh Para Termohon, meliputi kerugian pembuatan tambak dan kehilangan usaha atau mata pencaharian dan keuntungan yang diharapkan, akibat Rencana Pembangunan Bandara tersebut;
15. Bahwa dengan tidak terjadinya kesepakatan atas bentuk dan nilai ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, maka sudah sewajarnya Pemohon menuntut keadilan guna mendapatkan penetapan ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan;
16. Bahwa tuntutan ganti kerugian dari Pemohon Keberatan adalah dalam bentuk uang akibat adanya kerugian fisik/langsung maupun non fisik/tidak langsung yang dialami Pemohon atas dampak proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru tersebut, berdasarkan nilai ganti rugi sebagaimana yang telah dirinci tersebut di

Halaman 8 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



atas;

17. Bahwa mengingat Para Termohon telah merugikan Pemohon, maka sudah sepatutnya bila Pemohon Keberatan menuntut Para Termohon ke Pengadilan, untuk memohon keadilan dan kebijaksanaan, dengan menetapkan bentuk dan besarnya nilai ganti kerugian atas usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tersebut, dan menghukum Para Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon Keberatan adalah pihak yang beriktikad baik;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Termohon Keberatan adalah pihak yang tidak beriktikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian fisik maupun non fisik, terhadap usaha tambak seluas 1.144 m² dan seluas 255 m², sehingga total lahan tambak seluas 1.399 m² yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang terdampak Proyek Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, yang dibiayai oleh Termohon Keberatan II;
5. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas jumlah ganti kerugian fisik maupun non fisik dan kehilangan mata pencaharian atas usaha Tambak yang dikelola Pemohon Keberatan masing-masing kerugian sejumlah Rp483.265.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah) – dengan perincian:

- Pembuatan tambak	45.190.000
- Keuntungan yang diperoleh	219.037.500
- Kehilangan mata pencaharian	219.037.500
Total kerugian pemohon	483.265.000

(Delapan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan II (PT Angkasa Pura I Persero) untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang secara tunai kepada Pemohon sebesar Rp483.265.000,00 (delapan

Halaman 9 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum kasasi dari Para Termohon Keberatan;
8. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan ini;
9. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap surat permohonan keberatan tersebut Pemohon Keberatan menyatakan ada perubahan Permohonan:

- I. Dalam Posita Surat Permohonan Keberatan:

Posita Nomor 07 halaman 4 baris ke lima tertulis :... mengajukan gugatan keberatan yang benar adalah:... Permohonan Keberatan

- II. Dalam Petitum Surat Permohonan:

Petitum Nomor 07, huruf F tertulis:... (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);.. yang benar adalah... (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. tanggal 21 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian fisik terhadap usaha tambak seluas 255 m², yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
3. Menetapkan secara hukum jumlah ganti kerugian fisik atas usaha Tambak yang dikelola Pemohon Keberatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang secara tunai kepada Pemohon Keberatan, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan apabila putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III/Pemohon Keberatan tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, III dahulu Termohon Keberatan I, II masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, III dahulu Termohon Keberatan I, II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan I, II pada tanggal 21 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Oktober 2016 dan 24 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tersebut masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, III juga Para Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi II, III juga Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II, III juga Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 11 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III/Pemohon Keberatan dan Pemohon Kasasi II, III juga Para Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Keberatan Pertama:

Tentang Kekeliruan Penerapan dan Pertimbangan Hukum atas sebagian Obyek Ganti Rugi.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 September 2016 Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. yang dimohonkan Kasasi *a quo*, dalam menetapkan pembayaran ganti rugi, atas objek tambak milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, ternyata belum layak dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dikarenakan dalam pertimbangan pembuktiannya telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap sebagian objek ganti rugi, sehingga putusan tersebut merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tambak milik Pemohon Keberatan berada diatas lahan Paku Alaman Ground (PAG) masing-masing: 1. seluas 255 m² tercatat dalam Nomor Urut 44 dan 2. seluas 1.144 m², tercatat dalam Nomor Urut 93, keseluruhannya seluas 1.399 m², yang kesemuanya terletak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, masuk dalam areal terdampak Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo. Objek ganti rugi tersebut telah tercatat dan terdata dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kulon Progo, yang dibuat dan diidentifikasi oleh Tim Satgas yang ditugaskan Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I; (*vide* bukti P-4);
3. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wates perkara *a quo*, dalam jawabannya pada prinsipnya hanya memperlakukan tentang perizinan tambak saja. Padahal tentang perizinan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: Kewajiban memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 12 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Pasal 11 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi: a). Pembudidaya ikan kecil; b). Pemerintah, pemerintah daerah atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Pasal 13 menyebutkan: kriteria pembudidayaan ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa:

- a). Melakukan pembudidayaan ikan dengan teknologi sederhana; dan
- b). Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan :

- 1). Usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 2 ha;
- 2). Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 5 ha;
- 3). Usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a. pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b. pembesaran, tidak lebih dari 2 ha;

Dengan demikian tambak milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sudah selayaknya demi hukum dan keadilan untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil; Sehingga alasan adanya *legal opinion* (pendapat hukum) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan tambak milik Para Petani tambak adalah tidak berijin atau ilegal adalah tidak benar;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang menolak dalil-dalil dari Para Termohon Keberatan/Para Termohon Kasasi, dan mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon Keberatan;

- 4. Bahwa objek ganti rugi lahan tambak milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, telah tercatat dalam Daftar Nominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kulon Progo, (*vide* bukti P-4), yang merupakan Daftar identifikasi objek maupun subyek, yang akan mendapatkan ganti rugi; namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menetapkan ganti rugi terhadap satu bidang tambak milik Pemohon kasasi yang lahannya seluas 255 m²;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut, terhadap pertimbangan dalam menetapkan pemberian ganti rugi, masih kurang tepat atau kurang sempurna. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam putusannya tersebut, mempertimbangkan terhadap fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu bukti P-4 (Daftar Nominatif Desa Jangkaran);



Dengan demikian pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates *a quo*, yang tidak mempertimbangkan 1 (satu) bidang lahan usaha tambak milik Pemohon Kasasi lainnya (seluas 1.144 m²) adalah tidak tepat dan tidak adil. Sebab berdasarkan fakta hukum kedua tambak milik Pemohon Kasasi tersebut, oleh Satgas yang ditugaskan Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I untuk melakukan pendataan dan inventarisasi serta melakukan identifikasi tambak milik warga yang akan mendapatkan ganti rugi;

Dalam hal ini terhadap penilaian atau pertimbangan atas sebagian objek ganti rugi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates *a quo*, dalam pertimbangannya telah tidak tepat dalam menentukan penilaian dan menerapkan hukum pembuktian atas sebagian objek ganti rugi;

Seharusnya Pemohon Kasasi berhak atas ganti rugi fisik dan ganti rugi non fisik terhadap 2 (dua) bidang lahan tambak miliknya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, sehingga yang dikabulkan bukan hanya 1 (satu) bidang lahan tambak saja, namun seharusnya berdasarkan substansi pemberian ganti rugi yang layak dan adil menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum;

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Wates perkara *a quo*, telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, dengan mendasarkan putusannya pada adanya bukti P-5 dibandingkan dengan bukti P-4;

Justru bukti P-5 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, tidak setuju terhadap Hasil Kesepakatan tersebut (*vide* bukti P-5);

Sebab tidak terjadi musyawarah dan tidak terjadi kesepakatan (lihat *vide* bukti P-5), dikarenakan yang terjadi Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I, menyampaikan informasi, bahwa tambak milik Para Petani Tambak tidak mendapat Ganti Rugi (ganti rugi Rp0,00) karena adanya *legal opinion* (pendapat hukum) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang menyatakan tambak milik para petani tambak yang terdampak Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta adalah tambak ilegal (tambak tidak berijin);

Dalam hal ini prinsip-prinsip musyawarah dalam Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana di amankan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, tidak dipenuhi oleh Para Termohon Kasasi/Termohon Keberatan, sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan. (*vide* bukti P-1, P-2A, P-2B, P-3A, P-3B, P-4, P-6, P-7, dan P-8);

6. Bahwa atas putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi *a quo*, dalam



pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, karena mengambil kesimpulan berdasarkan alat pembuktian yang tidak tepat, sehingga keliru dalam melakukan penilaian atas objek ganti rugi. Yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah dirugikan secara hukum, maupun secara materiil dan immateriil;

7. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang didukung bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kepala Desa Jangkaran dan surat pernyataan atas nama Pemohon Keberatan, terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah benar pihak yang berhak atas 2 (dua) bidang usaha tambak yang telah tercatat dalam Daftar Nominatif Desa Jangkaran, Kec.Temon, Kulon Progo, Tanah PAG Nomor Urut 44 seluas 255 m², dan Nomor Urut 93 seluas 1.144 m²), atas nama Sutardi (Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi), yang terdampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta, di wilayah Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, (*vide* bukti P-2a dan P-2B, P-3A dan P-3B, dan P-4);
 8. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 September 2016 Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. yang menetapkan penilaian ganti kerugian atas obyek Ganti Rugi tidak sesuai dengan daftar Nominatif yang dikuatkan Surat Keterangan Desa Jangkaran dan Surat Pernyataan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan serta keterangan saksi-saksi, maka dalil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut, yang hanya mengabulkan pemberian ganti rugi hanya atas 1 (satu) bidang lahan tambak milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 *juncto* Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut, mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, terhadap pemberian ganti rugi yang layak dan adil atas kedua (2) bidang usaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut; (*vide* bukti P-2A, P-2B, P-3A, P-3B dan P-4);
 9. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang dimohonkan kasasi *a quo*, telah mendasarkan bukti P-5 yang ternyata tidak pernah disepakati isinya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan. Sehingga dengan demikian apabila dibandingkan, dengan bukti P-2.A, P-2.B, P-3 dan P-4, maka bukti P-5 tersebut justru membuktikan jika Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak pernah menyetujui pemberian ganti rugi;
- II. Keberatan Kedua.

Halaman 15 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Tentang Ganti Rugi Yang Layak Dan Adil:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak sependapat terhadap sebagian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Wates yang dimohonkan Kasasi *a quo*, berkaitan dengan penilaian atas pemberian ganti rugi atas usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi, hanya terbatas pada kerugian fisik atas 1 (satu) bidang lahan usaha tambak milik Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak berdasarkan bukti dan fakta hukum (*vide* bukti P-2A, P-2B, P-3A, P-3B dan P-4), terhadap pengelolaan 2 (dua) bidang usaha tambak, masing-masing seluas 255 m² dan seluas 1.144 m², namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates hanya mengabulkan 1 (satu) bidang usaha tambak seluas 255 m², sedangkan atas tambak lainnya seluas 1.144 m² tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut, padahal sesuai fakta hukum yang ada terdapat 2 (dua) bidang usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan, sebagaimana daftar nominatif yang telah dilakukan inventarisasi dan pendataan serta pengukuran atas luas tambak dalam area terdampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang dilakukan oleh Satgas yang dibentuk oleh Termohon Kasasi I/Termohon Keberatan I, yang telah melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates *a quo*, tidak melakukan penilaian sebagaimana mestinya. sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan. Oleh karenanya sudah sepatutnya bila pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut, untuk diperbaiki oleh Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan tentang pemberian ganti rugi yang bersifat fisik maupun non fisik;
3. Bahwa oleh karena pertimbangan putusan tersebut telah tidak tepat dan terjadi kekhilafan dalam menerapkan pembuktian atas pembayaran nilai ganti kerugian terhadap objek 2 (dua) bidang lahan tambak milik Pemohon Keberatan, masing-masing diatas lahan seluas: 255 m² dan di atas lahan seluas 1.144 m² dengan luas keseluruhannya 1.399 m², yang terdampak proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta. Sehingga sudah sepatutnya

Halaman 16 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 September 2016 Nomor 110/Pdt/G/2016/PN Wat.;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam melakukan budi daya usaha tambak udang, atas 2 (dua) bidang lahan tambak tersebut, telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan tambak dan biaya operasional budi daya tambak serta usaha tambak tersebut sebagai mata pencaharian bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sehingga dengan adanya Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan akan kehilangan usaha tambak dan kehilangan mata pencaharian, dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

- Biaya pembuatan tambak Rp 45.190.000,00

Hasil panen tambak yang sedianya

Diperoleh (1 x panen Rp73.012.500,00)

Satu tahun 3 x panen (3 x Rp73.012.500,00) Rp219.037.500,00

Kerugian kehilangan mata pencaharian

(kerugian non fisik) Rp219.037.500,00

Total nilai ganti kerugian fisik dan non fisik

yang seharusnya diterima Pemohon Keberatan Rp483.265.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa sudah sepatutnya berdasarkan perhitungan tentang usaha budi daya tambak tersebut dalam posita Nomor 3 di atas, maka sudah sewajarnya bila Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan menuntut ganti kerugian dari Para Termohon Keberatan atas 2 (dua) bidang tambak diatas lahan PAG seluas 255 m² dan seluas 1.144 m² dengan jumlah luas seluruhnya 1.399 m² tersebut;

Dengan demikian Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian fisik dan non fisik terhadap 2 (dua) bidang usaha tambak tersebut baik kerugian yang bersifat fisik maupun kerugian yang bersifat non fisik yang dinilai dengan uang sebesar Rp483.265.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan memohon kepada Yth. Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 September 2016 Nomor 110/Pdt/G/2016/PN Wat.;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Halaman 17 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, Majelis berpendapat bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut, hal mana dalam perkara perdata, dikenal adanya hukum antar waktu. Artinya, keabsahan suatu perbuatan perdata harus diukur berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, sebagaimana dipertegas Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Hak untuk hidup, baik untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (Halaman 44);

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2014-2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan: a. melengkapi RTRW Kabupaten dan b. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dan Pasal 111 huruf h berbunyi memanfaatkan wilayah atau melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September 2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada dan yang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mencantumkan ketentuan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.", selanjutnya dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Dalam

Halaman 18 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, berdasarkan pertimbangan dimaksud (halaman 50), dengan estimasi pembuatan tambak untuk luas sekitar 1000–1500 meter sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tambak milik Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil untuk tambak Pemohon Keberatan dengan luas 255 m² menetapkan jumlah/besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) (halaman 50);

Bahwa dengan keberatan tersebut Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan I akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan bukan menggarap/mengerjakan tambak di atas tanah negara melainkan menggarap/mengerjakan tanah untuk tambak diatas tanah milik Kadipaten Pakualaman status tanahnya bernama Pakualaman Ground (PAG), berkaitan dengan status garapan tambak diatas tanah PAG tidak ada yang berizin;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan yang dimaksud dengan memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Larangan terhadap tanah-tanah tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 4 tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi dilarang memakai tanah tanpa ijin

Halaman 19 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



yang berhak atau kuasanya yang sah;

- c. Bahwa penerima ganti rugi adalah pihak Kadipaten Pakualaman bukan penggarap (usaha tambak) dan Kadipaten Pakualaman akan memberikan tali asih/kompensasi kepada penggarap;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

Ad.1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berhak;

Pertimbangan kami adalah karena pada saat pembuktian persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi masing-masing atas nama:

- Saksi Muh Heri, selaku warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi Purwoko, selaku pendamping pembuatan tambak di Desa Jangkaran Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Maupun saksi-saksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu:

- Saksi Ir. Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo
- Saksi Agus Proklamator, S.E., dari Kantor Pakualaman,
- Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Kulon Progo;
- Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto oleh Majelis Hakim tidak disumpah dengan pertimbangan memiliki hubungan kerja dengan PT Angkasa Pura I);

Serta telah pula diperlihatkan:

- alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;

Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yang dimohonkannya;

Halaman 20 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Sementara Majelis Hakim hanya mengacu surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi berupa Daftar Nominatif yang dibuat oleh Satgas A dan Satgas B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta dengan berdasarkan informasi dari Saksi Purwoko selaku Pendamping Desa Jangkar, Kecamatan Temon yang nota bene tanpa dukungan bukti tertulis, padahal dalam Daftar nominatif Nomor 03/DN-PPT/I/2016 yang dibuat tanggal 6 Januari 2016 (bukti P-4) jelas tertulis pada kolom keterangan bahwa “petambak udang adaklah atas nama orang lain bukan atas nama Termohon Kasasi”;

Selanjutnya tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengelola tambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpa ijin, sedangkan bukti tertulis dari Termohon Kasasi yaitu:

“Surat Keterangan Desa Jangkar Nomor 615/619/VII/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Jangkar tanggal 21 Juli 2016 (bukti P-2) untuk menerangkan dan membenarkan Surat Pernyataan Termohon Kasasi tanggal 20 Juli 2016 (bukti P-3) yang menyatakan Termohon Kasasi adalah penggarap tanah PAG sejak tahun 1986 dan pengelola tambak sejak tahun 2013” tidaklah dapat diyakini kebenarannya karena telah nyata bahwa:

- Surat pernyataan Termohon Kasasi tidak dilampirkan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan dan;
 - Saksi dari Termohon Kasasi yang bernama Purwoko Pendamping telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Surat Pernyataan Termohon Kasasi dan Surat Keterangan Kepala Desa Jangkar tersebut dibuat setelah Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Nomor 415/BA-PPT/VII/2016 (bukti P-5) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DI Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal 21 Juli 2016 dan bukan sebagai data pendukung dalam penyusunan Daftar Nominatif yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2016;
- dan Saksi Purwoko juga menerangkan bahwa Surat Pernyataan Termohon Kasasi serta Surat Keterangan Kepala Desa dibuat atas saran dan petunjuk dari oknum Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Propinsi DI Yogyakarta dan tidak diketahui apa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut karena kegiatan penilaian ganti kerugian sudah selesai dan sudah diumumkan pada waktu itu;

Halaman 21 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu fakta ini telah nyata menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berhak, namun Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

a. Pasal 1 butir 6 menyebutkan:

“Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a) Pemegang hak atas tanah;
- b) Pemegang hak pengelolaan;
- c) Nadzir untuk tanah wakaf;
- d) Pemilik tanah bekas milik adat;
- e) Masyarakat hukum adat;
- f) Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g) Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau;
- h) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”;

b. Pasal 6 ayat (1) huruf e butir 1:

“Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat uraian yang menjadi dasar keberatan yaitu kedudukan hukum pemohon sebagai pihak yang berhak”;

c. Pasal 7 huruf b:

“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh pemohon keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah”;

d. Pasal 9:

“Fotokopi alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 22 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Pasal 7 huruf a dan b wajib dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Ad.2. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan jawaban Pemohon Kasasi II (semula Termohon Keberatan II) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti sah yang mendukung bahwa Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sebagai Pemilik atau Penggarap yang sah dari Usaha Tambak di atas Tanah Milik Pakualaman (PAG) seluas 1.144 m² dan luas 255 m² terletak di wilayah Desa Jangkanan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa:

- Tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan ataupun surat ijin usaha tambak/pengelolaan tambak dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah Kulon Progo) maupun;
- Ijin/persetujuan sebagai penggarap/pengelola usaha tambak di tanah hak milik Pakualaman (PAG) yang seharusnya diperoleh dari pemilik tanah yaitu pihak Pakualaman karena selama pembuktian persidangan;
- berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi masing-masing atas nama:
 - Saksi Muh Heri, selaku warga masyarakat pada Kantor Desa Jangkanan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
 - Saksi Purwoko, selaku pendamping warga Desa Jangkanan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- maupun saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:
 - Saksi Sudarna, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;
 - Saksi Susilo, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
 - Saksi Agus Proklamator, S.E, dari Kantor Pakualaman;
- Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah kecuali) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;

Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa

Halaman 23 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;

Bahkan dalam persidangan telah terungkap sesuai keterangan:

- Saksi Agus Proklamator, S.E., (disumpah) yang menerangkan bahwa:

"Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) sama sekali tidak dikenal oleh saksi dan pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijin baik lisan maupun tertulis (ijin Magersari/Kekancingan) kepada Termohon Kasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah hak milik Kadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Bayeman, Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pula pihak Pemda Kabupaten Kulon Progo setahu saksi tidak pernah menerbitkan ijin usaha tambak udang dalam bentuk Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) atas nama Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

"Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten;

Selanjutnya menurut saksi Agus Proklamator, S.E., dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) telah diatur dalam masing-masing pasal diantaranya, yaitu:

a. Pasal 47:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah

Halaman 24 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 49:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa”;

c. Pasal 51:

“Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Keterangan Saksi Agus Proklamator, S.E., dari Kantor Kadipaten Pakualaman tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan:

- Saksi Sudarna, selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yang menerangkan pada intinya:

- Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas;
- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkan pengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambahnya tersebut telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan dan ayat (2) menyebutkan “ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ijin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat ijin Usaha Perikanan) atau TPUPI (Tanda Pencatatan



Usaha Pembudidayaan Ikan)” (TK 2 – 6);

2. Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) menyebutkan:

”Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/ BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat” (TK 2 – 7);

- Bahwa benar usaha tambak udang diakui Termohon Kasasi dikelolanya/digarap di Dusun Bayeman, Desa Jangkar, Kecamatan Temon yang berlokasi di atas tanah Pakualaman (PAG) bukanlah tempat/zonasi peruntukan tambak udang dan keadaan ini telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 (TK 2-7);
- Bahwa benar zona lokasi tempat tambak yang diklaim milik Termohon Kasasi adalah diperuntukkan bagi pertanian dan peternakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013 karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar;
- Bahwa benar peraturan yang mengatur tentang usaha budidaya perikanan di air payau ataupun budidaya udang di tambak wajib berlaku bagi seluruh masyarakat pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan di Kabupaten Kulon Progo dan peraturan tersebut dianggap diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat karena dapat diakses secara luas melalui situs website resmi Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi

Halaman 26 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Hukum (SJDIH) Pemkab Kulon Progo serta Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 telah diumumkan dalam Berita Daerah (Lembaran Daerah) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2015 dan pelaku usaha seharusnya sebagai pihak yang proaktif mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apalagi pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, demikian pula dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 sesuai Pasal 114 disebutkan bahwa "Perda ini berlaku pada tanggal 1 September 2014 dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo";

- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/budidaya udang di tambak di Kabupaten Kulon Progo baik yang telah berdiri sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah pernah melakukan bimbingan teknis kepada perwakilan kelompok usaha budidaya ikan pada sekitar tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo di Wates;
- Bahwa benar pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo telah pernah melayangkan surat pemberitahuan/teguran kepada para petambak udang vaname di luar zonasi peruntukan yang pada intinya melarang usaha budidaya perikanan air payau/tambak udang yang berada di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya masing-masing yaitu:
 1. Surat Nomor 523/0581 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 27 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor 523/0671 tanggal 14 Juli 2014 perihal Pemberitahuan/Teguran ke-2 yang ditandatangani oleh drh. Rr. Endang Purwaningrum TL selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;

3. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor:500/4011 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penataan Tambak di Wilayah Pesisir yang ditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo;

4. Surat Nomor 500/7776 tanggal 30 Maret 2015 perihal Peringatan bagi Petambak yang ditandatangani oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo;

- Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebut disampaikan melalui kantor Desa Jangkar, Kecamatan Temon dikarenakan tidak diketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;

Keterangan Saksi Sudarna didukung pula oleh keterangan dari:

- Saksi Susilo (disumpah) dari Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Kulon Progo yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan air payau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kriteria:

1. Apabila untuk pembesaran dengan luasan 0-5 ha wajib mendaftarkan usahanya kepada Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan maka jenis perijinannya yaitu berupa Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

2. Apabila untuk pembesaran dengan luasan lebih dari 5 ha wajib mendaftarkan usahanya kepada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP) maka jenis perijinannya yaitu berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Bahwa benar jika lokasi tambak udang/pembudidayaan ikan air

Halaman 28 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



berada di luar kawasan zonasi peruntukannya maka ijin usaha tidak dapat diberikan, hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034;

- Bahwa benar dalam pemberian perijinan tersebut tetap memerlukan data dukung baik berupa ijin gangguan (HO) dan analisa dampak lingkungan (amdal) maupun ijin lokasi, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterbitkan ijin usaha;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Termohon Kasasi (semula Pemohon keberatan) mengelola tambak udang di Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2013 karena usaha tambak udang Pemohon Keberatan tidak pernah terdaftar/memperoleh ijin;
- Bahwa benar jika lokasi tambak udang Termohon Kasasi berada di Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo, maka telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034 menyebutkan: “Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran”, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;

Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi dengan keterangan:

- Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura I selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI

Halaman 29 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di Provinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;

- Bahwa benar saksi melakukan penilaian dengan standard resmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yang tercantum dalam SPI 306 dan Petunjuk Teknis SPI 103 beserta lampirannya dan SPI 301;
- Bahwa Penilai Pertanahan yang ditugaskan melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Penilai Pertanahan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar nilai/daftar/data pembandingan aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa pasar untuk per bidang tanah, meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Tanaman
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai;(sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum);
- Bahwa benar Penilai Pertanahan melakukan tugas penilaian pertanahan terhadap objek pengadaan tanah di lima Desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dimulai sejak bulan Mei 2016, meliputi Desa Sindutan, Desa Jangkar, Desa Kebonrejo, Desa Paliha dan Desa Glagah;
- Bahwa benar tidak semua objek pengadaan tanah yang tercantum dalam daftar nominatif dapat dilakukan penilaian/ dapat dihitung nilainya oleh Penilai Pertanahan dikarenakan

Halaman 30 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



adanya keharusan dari Penilai Pertanahan untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang *feasible legality* dari objek pengadaan tanah yang dinilai, yang selanjutnya disebut dengan adjustment di antaranya adalah kesesuaian legalitas tentang objek yang akan dinilai;

- Bahwa benar terbukti banyak peralatan-peralatan berupa barang-barang elektronik yang tercantum dalam daftar nominatif tidak dilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakan termasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan;
- Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Dusun Bayeman, Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo dinilai Penilai Pertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan tambak udang tersebut tidak mempunyai kesesuaian atau kelayakan legalitas hukum karena lokasi tempat tambak udang tersebut berada di luar zonasi peruntukannya, karena telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034 menyebutkan: "Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkar dan Desa Banaran";
Selanjutnya dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkar zonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;
- Bahwa benar tidak ada data pendukung daftar nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan bahwa tambak didirikan pada tahun 2013 dan tidak ada pula data pendukung tertulis yang membenarkan si Termohon Kasasi (semula Pemohon Keberatan) adalah pemilik tambak yang sah;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak Pelaksana Pengadaan Tanah (Kanwil BPN Provinsi Yogyakarta) mempertegas lagi tentang status legalitas kepemilikan tambak dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo untuk mempertanyakan perijinan seluruh tambak yang ada di Desa Jangkar dan Desa

Halaman 31 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Jangkaran, Kabupaten Kulon Progo dan ternyata diperoleh jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupa Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI Yogyakarta yang ditandatangani oleh Ir. RM. Astungkoro, M.Hum. selaku Sekda Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 500/2974 tanggal 20 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa usaha tambak yang berada di lokasi calon Bandara Internasional Yogyakarta Kab. Kulon Progo semuanya tidak ada yang berijin (*in casu* termasuk usaha tambak yang digarap Termohon Kasasi) (TK 2-5);

- Bahwa benar apabila Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap tambak udang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi yang notabene berlokasi di luar zonasi peruntukannya serta tidak memiliki ijin usaha dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maka akan berdampak terhadap terjadinya kerugian keuangan Negara dikarenakan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang tidak berhak, dan hal ini nantinya bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang akan mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban Penilai Pertanahan;

Dengan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, kami akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam membuat dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara perdata atas nama Termohon Kasasi Nomor 129/Pdt.G/2016/PN Wat. tanggal 21 September 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan bahwa tambak yang tidak terdaftar atau tidak berijin dan tidak sesuai peruntukannya yang telah ada sejak Tahun 2013 berdasarkan pada Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tidak beralasan hukum karena Perda dan Peraturan Bupati tersebut tidak bisa diberlakukan surut (asas non retroaktif);

Penjelasan dan Tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- a.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara



tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak tahun 2013, dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan yang bernilai informatif dari Saksi Muh Heri dan Saksi Purwoko yang tidak didukung oleh bukti tertulis, sedangkan foto tambak tidak bisa begitu saja dijadikan dasar/diragukan kebenarannya dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan setempat/sidang lapangan (*cross cek lapangan*) untuk membuktikan kebenaran objek tambak tersebut;

Apalagi Surat Keterangan Kepala Desa Jangkarang tanggal 20 Juli 2016, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dikarenakan Surat Keterangan Kepala Desa Jangkarang tersebut dibuat setelah seluruh kegiatan penilaian ganti kerugian selesai dilaksanakan;

Oleh karenanya asas *non retroaktif* tidak dapat dijadikan dalil/dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dikarenakan:

- tidak ada fakta bukti tertulis yang mendukung kebenaran bahwa tambak Termohon Kasasi dimulai sejak tahun 2013 dan;

- tidak ada juga bukti tertulis yang mendukung bahwa Termohon Kasasi selaku pemilik tambak,

sedangkan nama Termohon Kasasi yang tercantum dalam daftar nominatif sesuai keterangan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan yang sah, bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hak kepemilikan usaha tambak dan tidaklah bersifat mutlak untuk dilakukan penilaian;

a.2. Majelis Hakim hanya mengutip keterangan saksi Purwoko secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan:

- Saksi Muh. Heri (Saksi dari Pihak Termohon Kasasi) di bawah sumpah telah menerangkan bahwa "Usaha Tambak Udang yang digarap Termohon Kasasi dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan panen sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam 1 (satu) kali panen telah dapat mengembalikan modal usaha tambak udang yang dikelola/digarap oleh Termohon Kasasi";



Jika memang Termohon Kasasi membuka usaha tambak sejak tahun 2013 maka pada tahun 2014 modalnya sudah kembali berkali lipat, sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi bahkan sudah mendapatkan keuntungan berlipat ganda;

Kalaupun akhirnya Majelis Hakim mengacu kepada keterangan Saksi Purwoko maka jelas asas non retroaktif tidak berlaku dalam hal ini, dengan alasan:

- jika keterangan Saksi Purwoko dikaitkan dengan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2023 yang berlaku sejak tanggal 1 September 2014, apabila panen udang di tambak terjadi pada saat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Perda Nomor 10 Tahun 2014 semestinya/seharusnya pada saat memulai pembibitan udang baru untuk pembesaran di tambak maka Termohon Kasasi harus tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2014, karena secara hukum logika yang harus diperhatikan adalah pada saat kapan kembali dimulainya pembudidayaan udang, bukan sejak berdirinya tambak;
- apabila benar Termohon Kasasi menabur benih udang baru di tambak pada bulan Agustus 2014 dan panennya pada bulan November 2014, maka pada bulan Desember 2014 Termohon Kasasi harus menutup usaha tambak yang digarapnya karena lokasi usaha tambak udang Termohon Kasasi di Desa Jangkanan tidak sesuai lagi dengan zonasi peruntukannya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf d Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2034 menyebutkan: “Sub zona tambak berada di Desa Jangkanan dan Desa Banaran”, (Perda tersebut telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 September 2014);

Hal ini sesuai dengan asas hukum nasional *lex posterior derogat lex priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan



yang bersifat umum) untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 sebagai peraturan yang bersifat umum, yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan asas non retroaktif dalam perkara ini;

Demikian pula secara mutatis mutandis berlaku dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan yang berlaku sejak tanggal 25 November 2015;

Perlu kami tegaskan lagi bahwa peraturan-peraturan tersebut semuanya telah berlaku pada saat Tim Penilai Pertanahan melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah khususnya terhadap tambak udang garapan Termohon Kasasi di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yaitu pada bulan Mei 2016, sehingga Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tersebut yang dijadikan dasar dan acuan oleh Tim Penilai Pertanahan untuk menilai Tambak Udang yang digarap Termohon Kasasi diberi harga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan bertentangan dengan Perda dan Peraturan Bupati dimaksud;

Kalaupun Majelis Hakim menganggap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 bersifat non retroaktif karena tambak berdiri pada tahun 2013, maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim semestinya menggunakan:

"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang (bukti TK 2-8) yang masih berlaku dan belum pernah dicabut sampai sekarang ini, dan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada Point 5.2.butir 3) telah tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD), dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan

Halaman 35 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat”; Namun ternyata Majelis Hakim mengabaikan semua bukti-bukti dari Pemohon Kasasi dalam putusannya termasuk seluruh peraturan-peraturan yang dijadikan alat bukti surat, sehingga jelas tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Pertimbangan bahwa Tambak yang berdiri di atas tanah PAG berdasarkan Keterangan saksi Agus Proklamator, S.E bahwa Pakualaman tidak pernah keberatan masyarakat mengerjakan tanah PAG, didukung oleh saksi Muh Heri yang menerangkan bahwa para penggarap PAG sejak dulu turun temurun dan keberadaan tambak sejak 2013 yang dikuatkan dengan bukti pernyataan dari Desa tetanggal 20 Juli 2016 dan bahwa Pengelolaan tanah diketahui oleh pihak Kadipaten sehingga tidak bertentangan dengan Perda Keistimewaan DIY;

Penjelasan dan tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah:

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuat dalil-dalil pertimbangannya dengan alasan:

- b.1. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam poin huruf a tersebut di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa:

- tidak dapat diperlihatkan adanya data pendukung secara tertulis yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuka usaha tambaknya sejak tahun 2013;
- Surat Keterangan Kepala Desa Jangkaran tanggal 20 Juli 2016 yang tidak melampirkan surat pernyataan dari Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dikarenakan sesuai keerangan dan pengakuan Saksi Muh Heri (Saksi dari pihak Termohon Kasasi) dipersidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa:
“Surat Keterangan Kepala dibuat atas saran dan petunjuk dari oknum pihak pelaksana pengadaan tanah dari Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta dan tidak diketahui apa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut karena seluruh kegiatan penilaian ganti kerugian telah selesai dan telah diumumkan pada waktu itu;
- Demikian pula atas keterangan Saksi Agus Proklamator, S.E.



bahwa Majelis Hakim telah salah mengutip dan menyimpulkan keterangan Saksi Agus Proklamator, S.E. tersebut dikarenakan Saksi Agus Proklamator, S.E. di persidangan telah menerangkan bahwa pihak Pakualaman mengetahui masyarakat menggarap tanah PAG untuk pertanian dan peternakan bukan untuk tambak, namun penggarapan/pemanfaatan tanah PAG serta perubahan pemanfaatannya belum pernah mendapatkan persetujuan dari pihak Pakualaman dan di persidangan terungkap dari keterangan saksi Agus Proklamator, S.E. yang mewakili Pakualaman menerangkan keberatan dengan pembukaan tambak di tanah PAG karena tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- sesuai keterangan Saksi Agus Proklamator, S.E. dipersidangan, pemanfaatan/pengelolaan tanah PAG oleh warga masyarakat harus tetap mengacu kepada:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK2-3) pada Pasal 33 ayat (4) telah mengatur yaitu:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kesultanan untuk tanah Kesultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”;

(Termohon Kasasi tidak ada izin persetujuan dari Kadipaten Pakualam untuk menggarap/mengelola usaha tambak udang);

- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (TK 2-4) khususnya dalam Pasal 47 ayat (3) menyebutkan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang Zonasi/RTRW dan Perijinan serta peraturan terkait lainnya);

Pasal 49:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah



Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa”;

(Termohon Kasasi tidak pernah berkoordinasi dan tidak melibatkan Pemprov. DI Yogyakarta, Pemkab. Kulon Progo dan Pemerintah Desa dalam menggarap/mengelola usaha tambaknya);

Pasal 51:

“Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;

(Termohon Kasasi tidak mematuhi peraturan tentang zonasi/RTRW dan perijinan serta peraturan terkait lainnya);

- c. Pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak pada poin 5.2. terkait wajib daftar, pendapat Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban hukum memiliki konsekuensi yang berbeda sehingga makna wajib daftar yang tidak dilanjutkan dengan aturan merupakan pemberitahuan bagi pemangku jabatan/kepentingan; Penjelasan dan tanggapan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah: Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menafsirkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 yang berlaku tanggal 23 Juli 2004 dengan alasan:

- c.1. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah dicabut;
- c.2. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun norma yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut adalah setelah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Bupati atau peraturan pelaksana lainnya;
- c.3. Dalam peraturan tersebut tidak ada satupun norma yang mengatur bahwa berlakunya peraturan tersebut harus melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terlebih dahulu;
- c.4. Dalam poin pertama memutuskan menetapkan disebutkan bahwa “Pedoman umum budidaya udang di tambak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini”;

Halaman 38 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



c.5. Dalam poin kedua memutuskan menetapkan disebutkan bahwa
"Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
digunakan sebagai acuan bagi pejabat, aparat, dan/atau
masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang di tambak";

c.6. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
tanggal 23 Juli 2004 Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman
Umum Budidaya Udang di Tambak pada poin 5.2.butir 3) secara
tegas menyebutkan:

"Usaha budidaya udang dapat dilakukan oleh perorangan atau
badan hukum (Perusahaan, Koperasi atau BUMN/BUMD),
dengan ketentuan bagi perorangan yang mengusahakan
budidaya udang dengan luas kurang dari 10 hektar wajib
mendaftarkan usahanya pada Dinas Kabupaten/Kota setempat;
Makna kata wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (tidak
boleh ditinggalkan) atau dapat juga diartikan sudah semestinya;
harus;

Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota setempat haruslah dimaknai
kepada Dinas Kabupaten/Kota yang terkait membidangi objek
perikanan/kelautan/peternakan di daerah setempat (dalam
perkara ini tentunya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Kulon Progo karena lokus tambak udang
berada di Dusun Bayeman, Desa Jangkar, Kecamatan Temon,
Kabupaten Kulon Progo);

c.7. Dalam Bab VI Penutup Lampiran Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 secara tegas
disebutkan bahwa:

"Pedoman umum ini merupakan pedoman bagi pejabat, aparat,
dan/atau masyarakat luas dalam melaksanakan budidaya udang
di tambak, yang harus dilaksanakan secara konsisten dan
bertanggung jawab, untuk memacu penerapan prinsip-prinsip
pengembangan dan pengelolaan tambak udang yang
berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan;

Makna kata Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah
bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dapat juga diartikan hal
(pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk



menentukan atau melaksanakan sesuatu;

Memedomani artinya mendasari pada pedoman, misalnya hakim hendaknya memedomani undang-undang tertulis dalam memutuskan perkara;

c.8. Keputusan Menteri (sekarang disebut Peraturan Menteri) diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri (sebelumnya Keputusan Menteri) ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 ayat 1, 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011), bahkan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten, sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex superior derogat lex inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah);

Dengan demikian sudah seharusnya/semestinya Majelis Hakim menjadikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 sebagai acuan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, dikarenakan hanya peraturan ini yang secara spesifik mengatur tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Udang di Tambak, sekaligus dapat dipergunakan/dipedomani untuk mengesampingkan asas non retroaktif dalam perkara *in casu*;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan/medomani peraturan ini dalam putusannya, bahkan mengabaikan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang diajukan Pemohon Kasasi;

Ad.3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) telah melampaui wewenangnya:

Bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penilaian sendiri atas besarnya ganti kerugian usaha tambak yang dikelola/digarap Pemohon Kasasi hanya atas dasar estimasi dan

Halaman 40 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



asumsi dengan mengacu pada keterangan Saksi Purwoko yang notabene berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Saksi Purwoko merupakan warga masyarakat biasa yang sehari-harinya hanya sebagai petambak tradisional di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan dalam mengusahakan tambaknya sendiri juga berada di kawasan luar zonasi peruntukan dan tidak mempunyai ijin sama sekali dari Pemkab Kulon Progo (termasuk petambak ilegal);
- Saksi Purwoko tidak mempunyai bukti resmi apapun tentang pengetahuan tambak baik melalui pendidikan/pelatihan resmi dari instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun di luar instansi Pemerintah Daerah;

Namun sangat disesalkan dan disayangkan Majelis Hakim mempercayai begitu saja keterangan yang bersifat informasi dari Saksi Purwoko yang notabene bukan ahli tambak dan tanpa bukti telah menerangkan di persidangan bahwa biaya pengusahaan tambak udang yang pernah dikelola sendiri oleh Saksi Purwoko untuk pembuatan tambak udang dengan luasan per 1000 – 1500 meter dibutuhkan biaya setidaknya sebesar Rp70 juta sampai dengan Rp80 juta, akan tetapi saksi Purwoko tidak dapat membuktikan sama sekali kebenaran real tentang bukti biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam membuka usaha tambaknya di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; tetapi asumsi dan estimasi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali berdasarkan keterangan saksi Purwoko tersebut telah dipergunakan Majelis Hakim melampaui wewenangnya menentukan besarnya ganti kerugian atas tambak udang yang digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;

Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni:

- Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku salah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian untuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasuk dalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksi proses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT Angkasa Pura I di Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah dan lisensi penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta Nomor 06/KPPS-PPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;
- Saksi Angger Fahrul Febrianto dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 dan Petunjuk Teknis SPI, sehingga kapabilitas dan akuntabilitasnya dapat dipercaya dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan kewenangannya untuk menentukan sendiri nilai besaran jumlah ganti kerugian tanpa mendasarkan dukungan bukti argumen yang cukup dari Penilai Pertanahan yang profesional dan kredibel apalagi Hakim sendiri tidak memiliki latar belakang di bidang Penilai Pertanahan dan Penilai Publik namun telah melampaui kewenangannya dengan memutuskan/menetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang dibayarkan kepada Termohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas putusan Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan beberapa Yurisprudensi yang kami kutip, dalam hal:

- Putusan tidak dirinci:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:”.... dalam persidangan pengadilan

Halaman 42 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”;

- Tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: ”suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”;

- Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: ”Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar ”uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;

- Tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: ”Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”;

- Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa: ”..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Selain daripada itu sebenarnya Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian ganti kerugian usaha tambak Termohon Kasasi dikarenakan secara nyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berhak menerima ganti kerugian, dikarenakan tidak satupun fakta yang membuktikan Termohon Kasasi termasuk sebagai:

Halaman 43 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pemegang hak atas tanah;
- b) Pemegang hak pengelolaan;
- c) Nadzir untuk tanah wakaf;
- d) Pemilik tanah bekas milik adat;
- e) Masyarakat hukum adat;
- f) Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;
- g) Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
- h) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum);

Dengan demikian tindakan Majelis Hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (*vide* Pasal 20 huruf a butir 2 Perma Nomor 3 Tahun 2016) dikarenakan Termohon Kasasi bukanlah pemilik tambak udang yang sah menurut hukum sehingga bukan termasuk pihak yang berhak;

Ad.4. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Wates) kurang memberi motivasi pada pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Dari awal dimulainya persiapan proyek, yaitu sejak terbitnya Ijin Penetapan Lokasi dari Gubernur DI Yogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 ha yang terletak di Desa Jangkar, Desa Jangkar, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, persiapan proyek ini telah menghadapi banyak problem dan permasalahan di lapangan dan bahkan sampai mendapatkan pertentangan/penolakan dari masyarakat sewaktu dilaksanakannya konsultasi publik dan akhirnya berujung kepada gugatan dari masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta di Yogyakarta tentang gugatan atas Surat Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tersebut, bahkan Gubernur DI Yogyakarta yang didampingi Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta akhirnya mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dikarenakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta telah mengalahkan pihak Gubernur DI Yogyakarta, namun demi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan proyek nasional yang bersifat strategis ini yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka semua pihak pemangku kepentingan berupaya keras untuk tetap memperjuangkannya dan berkat kerja keras Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta dan dukungan dari Jaksa Pengacara Negara, Mahkamah Agung memenangkan perkara tersebut dan mensahkan Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015;

Demikian pula seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pengadaan tanah terjadi perubahan penghitungan penilaian objek pengadaan tanah oleh Penilai Pertanahan yang diserahkan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi DI Yogyakarta selaku Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga terjadi perubahan besaran nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada pihak yang berhak menjadi sebesar Rp4.146.263.593.989,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan akibatnya semakin menambah beban keuangan negara di APBN Tahun 2016 yang harus dipersiapkan dalam proyek ini dan beban ini akan semakin membengkak dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Wates yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi atas usaha tambak udang yang digarap/dikelolanya, dan jika semua permohonan Keberatan dari Penggarap Tambak sebanyak 111 (seratus sebelas) keberatan yang berlokasi di Desa Jangkar dan Desa Jangkar, Kabupaten Kulonprogo (sesuai fakta persidangan bukan Pihak Yang berhak) dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates, maka akan berdampak terjadinya pemborosan anggaran keuangan negara yang luar biasa dalam APBN Tahun 2016, dan hal ini dapat memperlambat pelaksanaan kelanjutan pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turut menjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/kondisi defisit);

Halaman 45 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhi semangat perjuangan pihak-pihak pemangku kebijakan khususnya Pemohon Kasasi yang sungguh-sungguh berniat untuk mensukseskan percepatan pelaksanaan proyek ini dengan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran, demi merespon keseriusan dari Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan akselerasi percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 bahwa Proyek Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta ini termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional;

Bahkan demi menunjukkan perhatian serius dari seorang Presiden, Joko Widodo sampai mengeluarkan Instruksinya tanggal 8 Januari 2016, yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional dengan maksud agar semua pemangku kepentingan dari jajaran kementerian, penegak hukum sampai dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung, mengawal dan melaksanakan program ini dengan baik dan cepat;

Namun sangat disayangkan putusan Hakim dalam perkara ini tidak mendukung semangat dan jiwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016, yang menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diantaranya mencakup pengadaan lahan proyek;

Bahkan putusan Hakim dapat memperlambat dan atau menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut;

Bahwa sejak keluarnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 46 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dari seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional, baru Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta yang pertama sekali menerapkan/melaksanakan peraturan ini dalam hal penyelenggaraan/pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (dalam rangka pembangunan bandara baru internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo), sehingga putusan Hakim dalam perkara ini sangat mempengaruhi jiwa dan semangat pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di seluruh wilayah Indonesia;

Demikian pula putusan Hakim tidak boleh mengesampingkan dan mengabaikan peraturan yang ada dan berlaku semata-mata hanya karena melihat/mempertimbangkan dari aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat, karena untuk mengukur aspek manfaat dan rasa keadilan masyarakat harus tetap mengacu pada adanya kepastian hukum, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya Hakim kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang kurang memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta menyebutkan: "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten;
- Bahwa oleh karena status kepemilikan atas tanah adalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualaman yang dilakukan pengelolaannya oleh Pemohon dengan membuat tambak walaupun diketahui dan tidak dilarang oleh Sultan, tidaklah berarti Pemohon telah diberi izin menggarap dan menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai pemilik dan bukan pula sebagai penggarap yang mempunyai izin resmi, maka tidak beralasan hukum Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya;

Halaman 47 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan kawan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. tanggal 21 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I SUTARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III dahulu Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **SUTARDI** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi III **PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT, cq PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Wat. tanggal 21 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

Halaman 48 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 49 dari 49 hal.Put. Nomor 3674 K/Pdt/2016.